

RINGKASAN

**PUTRA
HIDAYATULLAH**
Nim: 190510231

**KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**
(Studi Penelitian Di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe)
(Dr. Arnita,S.H.,M.H dan Muhibudin, S.H.,M.Hum)

Kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar **PBB** di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun PBB adalah salah satu pajak yang cukup penting dalam sumber pendapatan di Kota Lhokseumawe, banyak wajib pajak yang masih belum sepenuhnya sadar akan kewajiban mereka. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, pengelolaan pajak, maupun efektivitas pengumpulan pajak di Kota Lhokseumawe. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB. Serta untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh BPKD Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh BPKD Kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar PBB.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan Wawancara secara langsung kepada informan dan responden. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Lhokseumawe. Menggunakan pendekatan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB masih rendah dan memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal edukasi, transparansi, dan pelayanan. Serta melakukan sosialisasi terkait dengan cara membayar PBB di Kota Lhokseumawe. Hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib Pajak dalam membayar PBB adalah tidak memahami kepatuhan hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga menyebabkan wajib pajak melanggar peraturan tanpa disadari berupa Sanksi administrasi. Upaya yang dilakukan oleh BPKD Kota Lhokseumawe berupa melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar PBB. Disarankan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas sosialisasi tentang kewajiban PBB. Serta terhadap BPKD agar dapat mengatasi hambatan serta menciptakan program untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar PBB. dan upaya-upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Wajib Pajak, Pembayaran PBB.

SUMMARY

**PUTRA
HIDAYATULLAH
NIM : 190510231** **TAXPAYER LEGAL AWARENESS IN PAYING
LAND AND BUILDING TAX RESEARCH (Study At
The Regional Financial Managementn Agency Of
Lhokseumawe City)
(Dr. Arnita, S.H.,M.H dan Muhibudin, S.H.,M.Hum)**

Legal awareness of taxpayers in paying PBB in Lhokseumawe City still faces various challenges. Although PBB is one of the most important taxes in Lhokseumawe City, many taxpayers are still not fully aware of their obligations. This raises various problems, both in terms of taxpayer compliance, tax management, and the effectiveness of tax collection in Lhokseumawe City. The purpose of this study is to find out how taxpayers' legal awareness in paying PBB. As well as to find out the obstacles faced by the Lhokseumawe City BPKD in increasing taxpayers' legal awareness in paying PBB and how efforts are made by the Lhokseumawe City BPKD to be able to increase legal awareness in paying PBB.

Type of research is empirical legal research by conducting direct interviews with informants and respondents. The nature of this research is descriptive analytical, which describes the legal awareness of taxpayers in paying PBB in Lhokseumawe City. Using an approach to Law Number 12 of 1994 concerning the United Nations and Qanun Aceh Number 1 of 2024 concerning City Taxes and City Levies.

Results of the study show that the legal awareness of taxpayers in paying PBB still needs more attention, especially in terms of education, transparency, and service. As well as conducting socialization related to how to pay the PBB in Lhokseumawe City. With consistent and directed socialization, it is hoped that the level of legal awareness of taxpayers can increase, thereby contributing to the optimization of PBB revenue as one of the sources of regional revenue. The obstacles faced in increasing taxpayers' legal awareness in paying PBB consist of low knowledge about taxes, lack of public enthusiasm for counseling and the burden of PBB. The efforts made by the Lhokseumawe City BPKD to be able to increase legal awareness in paying the PBB are to provide an understanding of the functions of the PBB, as well as to provide ease of payment assessment.

Recommended to the Lhokseumawe City Government to improve the quality of socialization about the obligations of the United Nations. As well as BPKD in order to overcome obstacles and create programs to increase legal awareness in paying PBB. and efforts to remind taxpayers to pay PBB

Keywords: Legal Awareness, Taxpayers, Payments PBB